

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kota Bandung

Bandung adalah sebuah kota dan ibu kota provinsi Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Bandung juga merupakan kota terbesar keempat di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, dan Medan. Kota ini merupakan kota terpadat kedua di Indonesia setelah Jakarta. Letak Kota Bandung berada di 141 km barat daya Jakarta, 363 km sebelah barat Kota Semarang, 400 km sebelah barat Yogyakarta, 675 km (melalui Kota Semarang) dan 765 km (Melalui Kota Yogyakarta) dan di sebelah barat Kota Surabaya. Kota Bandung adalah kota terbesar yang terletak di selatan Pulau Jawa.

Kota Bandung merupakan bagian dari Cekungan Bandung (Bandung Raya), kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Kota Bandung berbatasan langsung dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat di sisi barat dan utara, serta Kabupaten Bandung di sisi timur dan selatan.

2.1.1 Letak Geografis dan Kondisi Kependudukan

Kota Bandung terletak di wilayah administratif Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara 107o 32'38.91" Bujur Timur dan 60o 55'19.94" Lintang Selatan. Lokasi Kota Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan.

Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya :
 - a. Barat – Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibu kota Negara

b. Utara – Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan).

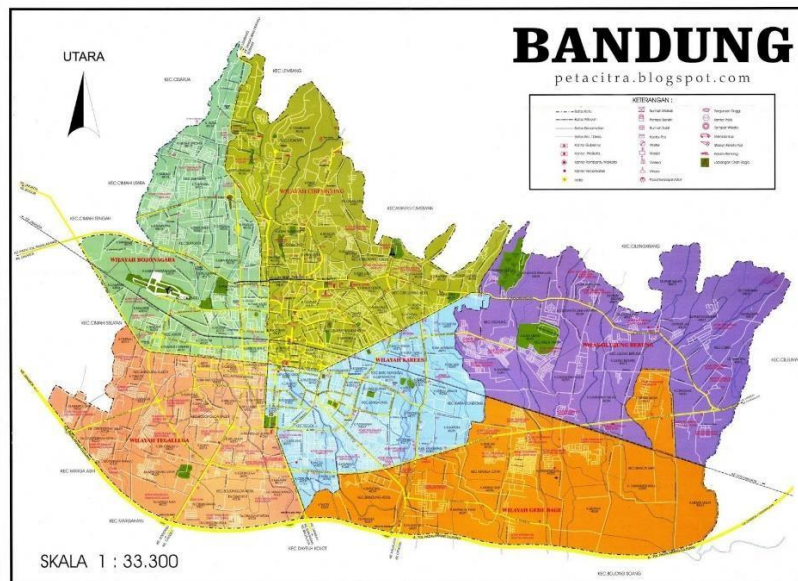
2. Letak yang tidak terisolasi dan dengan komunikasi yang baik akan memudahkan aparat keamanan untuk bergerak kesetiap penjuru. Adapun Batas-batas administratif Kota Bandung adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Lembang dan Cisarua.
- b. Sebelah barat : Kota Cimahi dan Kecamatan Padalarang.
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Dayeuhkolot dan Kecamatan Bojongsoang
- d. Sebelah timur : Kecamatan Cileunyi

Secara topografi, Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi terletak didaerah utara dengan ketinggian 1.050 meter dan terendah disebelah Selatan 675 meter diatas permukaan laut. Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kwarter dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, dibagian selatan serta di bagian timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Dibagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol. Kota Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara yang mempunyai sifat topografis bergunung dengan ketinggian sekitar 1.050 meter diatas permukaan laut dan bagian selatan yang relatif datar dengan ketinggian sekitar 675 meter diatas permukaan laut. Wilayah Kota Bandung sebagian besar terdiri dari topografi yang dibatasi oleh gunung-gunung berapi di sebelah utara, timur, dan selatan. Kota Bandung terletak padabagian utara cekungan ini. Disebelah barat, batasan dari cekungan ini dibentuk oleh jaringan timur laut – barat daya barisan pegunungan yang semakin curam ke arah baratlaut. Cekungan barisan pegunungan dibagi dalam dua bagian, yaitu Bandung Basin di sebelah timur dan

Batujajar Basin di sebelah barat Kota Cimahi. Ketinggian pegunungan tersebut berkisar 200-2400 meter, sedangkan ketinggian dasar cekungan 600 – 725 meter dengan sumbu cekungan 15 dan 45 km.

Gambar 2. 1 Peta Kota Bandung



Sumber : *petacitra.blogspot.com*

Kota Bandung dengan luas wilayah 16.730 Ha, pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebesar 2,555,187 jiwa. dengan tingkat kepadatan yang tertinggi terdapat di Kecamatan Bojongloa Kaler dengan kepadatan sebesar 41.501 jiwa/Km² , sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Gedebage, yaitu sebesar 4.530 jiwa/Km² . Perbedaan tingkat kepadatan dan ketidakseimbangan penyebaran penduduk disetiap wilayah Kota Bandung berimplikasi pada intensitas kegiatan dan mempengaruhi pergerakan penduduk serta kebutuhan transportasi Kota Bandung termasuk didalamnya sistem perangkutan. Apabila jumlah pergerakan yang terjadi tidak seimbang dengan penyediaan sarana dan prasarana yang ada, maka dapat menimbulkan persoalan dalam sistem perangkutan.

Tabel 2. 1 Data Jumlah Penduduk Kota Bandung 5 Tahun Terakhir

NO	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2019	2,480,464
2.	2020	2,500,956
3.	2021	2,527,854
4.	2022	2,545,005
5.	2023	2,555,187

Sumber: Database Disdukcapil Kota Bandung 2023

Berdasarkan pada Tabel 2.1 jumlah penduduk Kota Bandung dalam kurun waktu sembilan tahun terus mengalami peningkatan baik dianalisis berdasarkan jenis kelamin atau pun berdasarkan jumlah total keseluruhan penduduk Jawa Barat.

2.1.2. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2022 naik sebesar 5,41 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Dari sisi produksi, Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi dalam PDRB Kota Bandung Tahun 2022, yaitu sebesar 13,94 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen pengeluaran dengan laju pertumbuhan tertinggi dalam PDRB Kota Bandung tahun 2022, yaitu sebesar 5,73 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 2 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung

Pertumbuhan Ekonomi 2018 – 2022	
2018	7,08 %
2019	6,79 %
2020	-2,28 %
2021	3,76 %
2022	5,41 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung 2023

2.1.3. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan, pendidikan adalah suatu usaha terencana dalam mewujudkan suasana belajar serta proses belajar agar peserta didik tersebut dalam mengembangkan potensi dirinya memiliki kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan berbagai keterampilan lainnya yang dibutuhkan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Prasetyo, 2010).

Pendidikan merupakan indikator penting dalam kemajuan suatu bangsa. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dapat ditentukan oleh sumber daya yang bermutu. Metode guna menambah mutu sumber daya itu dengan cara meningkatkan mutu pendidikan di wilayah tersebut, salah satunya meningkatkan prasarana maupun sarana yang dibutuhkan guna mendukung pendidikan. Apabila prasarana maupun sarana yang telah memadai pastinya kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan pun akan tinggi. Dalam melihat besaran kesempatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat dilihat menggunakan indikator, yaitu berupa Angka Partisipasi Murni (APM) maupun Angka Partisipasi Kasar (APK).

Tabel 2. 3 Angka Partisipasi Sekolah Kota Bandung Tahun 2022

Karakteristik	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APS (ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH)			
7 – 12 Tahun	99,48	99,26	99,37
(1)	(2)	(3)	(4)
13 – 15 Tahun	96,69	98,59	97,65
16 – 18 Tahun	75,75	74,25	75,06
APM (ANGKA PARTISIPASI MURNI)			
SD	97,67	96,64	97,18
SMP	85,44	78,25	81,82
SMA	65,97	70,04	67,84
APK (ANGKA PARTISIPASI KASAR)			
SD	104,09	100,44	102,24
SMP	92,90	84,04	88,44
SMA	84,83	103,73	93,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2022

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka putus sekolah, namun ada beberapa faktor lain seperti faktor kelayakan sarana dan prasarana sekolah serta fasilitas belajar. Beberapa kecamatan untuk layanan pendidikan yang berkualitas dan baik masih sangat jauh seperti yang diharapkan serta masih banyaknya prasarana gedung yang mengalami kerusakan. Apabila semakin tinggi jenjang pendidikan maka akan semakin tinggi juga rata-rata lama sekolah, sehingga akan berdampak pada pola

fikir dan kualitas individu. Jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka tingkat produktivitas juga tinggi.

2.1.4. Gambaran Umum Pendidikan Inklusif di Kota Bandung

Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang memastikan semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama tanpa diskriminasi. Melalui pendidikan inklusif, keadilan sosial dapat ditingkatkan karena setiap anak, terlepas dari kemampuan atau kebutuhan khusus mereka, diberi kesempatan yang setara untuk berkembang dan berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, pendidikan inklusif berperan penting dalam mengurangi stigma terhadap ABK maka dengan mendorong pemahaman, empati, dan penerimaan di antara siswa. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan merangkul keberagaman, pendidikan inklusif membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Sekolah inklusi dapat diselenggarakan mulai dari jenjang pendidikan Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, hingga Sekolah Menengah Atas. Namun, jumlah sekolah inklusi masih terbatas, hal ini dikarenakan penyelenggaraannya memerlukan kesiapan yang khusus.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi semua warga negara. Dalam pendidikan reguler, pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas, kurikulum yang berkualitas, serta pelatihan bagi guru, sehingga setiap anak dapat menerima pendidikan yang layak. Namun, pentingnya peran pemerintah juga meluas ke pendidikan inklusif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus juga mendapatkan hak pendidikan yang setara. Mencakup pengembangan kebijakan yang mendukung inklusi,

penyediaan sumber daya tambahan, serta pelatihan khusus bagi tenaga pengajar. Selain itu, pemerintah juga harus aktif dalam mengadvokasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif, serta melakukan pengawasan untuk memastikan implementasi yang efektif. Dengan demikian, peran pemerintah tidak hanya sebatas penyediaan pendidikan, tetapi juga mencakup upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan inklusif bagi semua.

Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak pendidikan bagi semua warga negara, termasuk mereka dengan disabilitas. Undang-undang ini menegaskan pentingnya akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan nasional, serta mendorong lembaga pendidikan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan mereka. Namun, meskipun kebijakan ini telah dirumuskan dengan baik, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah. Beberapa daerah masih kurang dalam hal sumber daya, pelatihan guru, dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusif. Perbedaan infrastruktur dan pemahaman tentang inklusivitas antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menambah kompleksitas dalam penerapan kebijakan ini secara merata di seluruh Indonesia.

Pendidikan inklusif di Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama dalam hal kurangnya fasilitas yang memadai dan keterbatasan jumlah tenaga pengajar yang kompeten di sekolah-sekolah inklusif. Banyak sekolah di

Bandung yang belum sepenuhnya siap untuk menyediakan lingkungan belajar yang mendukung kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK), baik dari segi infrastruktur maupun kurikulum yang sesuai. Penerapan kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah seringkali terkendala oleh kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak sekolah, serta belum optimalnya koordinasi antara berbagai pihak terkait. Adapun, pendidikan inklusif di Kota Bandung menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan yang telah dirancang di tingkat nasional dan daerah diimplementasikan secara nyata di lapangan. Dengan mengeksplorasi lebih dalam proses penerapan pendidikan inklusif, kita dapat mengidentifikasi sejauh mana kebijakan ini berhasil memberikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.

Kebijakan nasional dan lokal tentang pendidikan inklusif di Indonesia berperan penting dalam memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Secara nasional, kebijakan pendidikan inklusif diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Selain itu, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa, memperkuat komitmen pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan ABK di sekolah-sekolah reguler. Di Kota Bandung, kebijakan ini diimplementasikan melalui Peraturan Wali Kota No. 420 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk ABK, serta

pengembangan sekolah-sekolah yang menyediakan layanan inklusif. Meskipun kebijakan ini telah lama diterapkan, tantangan dalam implementasinya masih ada, termasuk pemahaman yang kurang mendalam di kalangan tenaga pendidik serta keterbatasan infrastruktur yang mendukung pendidikan inklusif.

Peraturan Wali Kota Bandung No. 420 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang penting untuk mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah-sekolah di Kota Bandung. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ABK mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya melalui jalur pendidikan inklusif. Dalam peraturan ini, diatur tentang kuota khusus yang harus disediakan oleh sekolah untuk menerima ABK, serta kriteria dan mekanisme seleksi yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.

Kuota jalur Afirmasi KETM dan PDBK sebesar 15 persen, diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) meliputi penyandang disabilitas dan anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Dalam pendaftaran PPDB, Peserta Didik dengan Disabilitas wajib melampirkan surat rekomendasi dari tim assessment center Disdik Kota Bandung.

PPDB Sekolah Inklusi di Kota Bandung diatur secara khusus untuk memastikan bahwa ABK memiliki akses yang setara terhadap pendidikan. Melalui prosedur ini, diharapkan bahwa setiap anak, tanpa memandang kebutuhan khususnya, dapat belajar di lingkungan yang mendukung, inklusif, dan ramah anak. Meskipun kebijakan PPDB untuk ABK telah diimplementasikan, tantangan dalam pelaksanaannya masih signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di tingkat sekolah

mengenai pentingnya pendidikan inklusif, yang sering kali mengakibatkan ketidaksiapan dalam menerima ABK. Selain itu, keterbatasan fasilitas khusus, seperti ruang belajar yang disesuaikan dan alat bantu pendidikan, menjadi kendala dalam memastikan bahwa ABK mendapatkan pendidikan yang layak. Proses seleksi yang kadang-kadang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan khusus siswa juga menambah kompleksitas dalam implementasi kebijakan ini.

Peraturan Wali Kota Bandung No. 420 Tahun 2016 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Kebijakan memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dinas Pendidikan Kota Bandung memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satunya adalah upaya untuk memastikan setiap sekolah memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mendukung ABK. Namun, tantangan seperti minimnya tenaga pendidik terlatih, kurangnya fasilitas yang memadai, dan kurangnya koordinasi dengan sekolah layanan khusus seperti SLB, menunjukkan bahwa masih ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai penyelenggaraan pendidikan inklusi secara penuh. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya pelatihan khusus bagi guru-guru, peningkatan fasilitas sekolah yang ramah ABK, dan kampanye kesadaran masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, Kota Bandung dapat memperkuat implementasi pendidikan inklusi, sehingga semua anak dapat menerima pendidikan yang adil dan berkualitas.

Pada penelitian ini peneliti memilih dua Sekolah Dasar di Kota Bandung yang telah menerapkan program kebijakan pendidikan inklusif, sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar dengan fokus pada kinerja dari dua sekolah yang dipilih sebagai objek penelitian, yaitu SD Assalaam dan SDN 206 Putraco Indah. Pemilihan kedua sekolah ini didasarkan pada reputasi mereka sebagai sekolah dasar yang telah lebih dahulu membuka akses bagi siswa dengan disabilitas dibandingkan dengan sekolah lainnya.

SD Assalaam merupakan sekolah swasta yang dikenal dengan pendekatan pendidikan inklusif yang terstruktur dan komprehensif. SD Assalaam telah menerima siswa disabilitas sejak tahun 2005, Hal ini menjadikan SD Assalaam sebagai contoh yang relevan dalam penelitian ini, terutama dalam konteks penerapan pendidikan inklusif di sekolah swasta dalam merancang dan melaksanakan program-program pendidikan.

SDN 206 Putraco Indah, merupakan sekolah negeri yang dikenal sebagai sekolah yang telah menerapkan pendidikan inklusif sejak tahun 2015, lebih awal jika dibandingkan dengan sekolah dasar negeri lainnya meskipun dengan pendekatan yang sederhana, sekolah ini telah dipercayai orang tua masyarakat sekitar yang memiliki anak dengan disabilitas sejak lama.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali kinerja kedua sekolah dalam berbagai upaya dan tindakan usaha yang dilakukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kedua sekolah menerapkan pendidikan inklusif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan atau tantangan dalam pelaksanaannya.

Pemilihan SD Assalaam dan SDN 206 Putraco Indah sebagai lokasi penelitian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di Indonesia. Berikut merupakan profil kedua Sekolah Dasar tersebut :

a. Sekolah Dasar Negeri 206 Putraco Indah Bandung

Sekolah Dasar Negeri 206 Putraco Indah Bandung merupakan salah satu sekolah jenjang SD berstatus Negeri yang berada di wilayah Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Sekolah Dasar Negeri 206 Putraco Indah Bandung didirikan pada tanggal 1 Januari 1970 dengan Nomor SK Pendirian yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah yang memiliki 73 siswa ini dibimbing oleh 7 guru yang profesional di bidangnya. Kepala Sekolah Dasar Negeri 206 Putraco Indah Bandung saat ini adalah Darmawan. Operator yang bertanggung jawab adalah Septian Mulyadi.

Latar belakang sosial-ekonomi orang tua siswa di sekolah ini cukup beragam, meliputi pegawai negeri sipil, pedagang, wirausaha dan sebagainya. Dengan adanya keberadaan Sekolah Dasar Negeri 206 Putraco Indah Bandung, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kec. Lengkong, Kota Bandung dan juga wilayah sekitarnya.

Sekolah Dasar Negeri 206 Putraco Indah Bandung telah menerapkan program kebijakan Pendidikan Inklusif. Sekolah ini telah menerima banyak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sejak ditetapkan sebagai sekolah inklusi oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2015.

b. Sekolah Dasar Swasta Assalaam Bandung

Sekolah Dasar Swasta Assalaam didirikan tahun 1958 oleh K.H. Habib Utsman Alaydrus dengan nama “Sekolah Rakyat Assalaam” (SRA) dan pengelolaannya dipercayakan kepada R.K. Kartawisastera. SD Assalaam memiliki visi misi dalam membina akhlak meraih prestasi berwawasan global, berdasarkan imtak dan iptek, dengan menghargai kearifan karakter budaya serta peduli lingkungan.

SD Assalaam sekarang ini menggunakan Kurikulum Pendidikan tahun 2013. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini ada sebanyak 20 jenis. SD Assalaam juga ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata. SD Assalaam meraih segudang prestasi, baik itu di bidang akademik, non akademik, dan keagamaan. Salah satunya juara *robotic* tingkat internasional, *taek won do* tingkat internasional, nasional dan provinsi, sains tingkat nasional, dan siswa teladan.

Menurut Data Pokok Pendidikan di Kota Bandung (2020), di tahun 2020, Sd Assalaam memiliki jumlah guru sebanyak 25 orang dan jumlah siswa sebanyak 704 anak. Sekolah ini telah menerima Anak Berkebutuhan Khusus sejak tahun 2015, namun baru ditetapkan sebagai sekolah inklusi oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2021.